

GERAKAN RATU ADIL DALAM PERISTIWA LAMPUNG 1989?

Oleh: Abdul Syukur

Dosen Jurusan Sejarah FIS UNJ

Abstrak:

Pada tahun 1989 pemerintah Orde Baru menghancurkan perkampungan di Lampung yang dibangun oleh kelompok pengajian yang dipimpin Warsidi. Menurut sejarawan Indonesia terkemuka bahwa kelompok pengajian Warsidi adalah sebuah gerakan Ratu Adil. Tulisan ini merupakan bentuk kritikan terhadap analisa Sartono. Melalui metode wawancara naratif terhadap orang-orang yang mengalami, menyaksikan dan mengetahui kelompok pengajian Warsidi ini diperoleh kesimpulan bahwa mereka bukanlah sebuah gerakan Ratu Adil.

Laporan Surat Kabar

Dini hari 7 Februari 1989 pihak militer Lampung atas nama Pemerintah Orde Baru telah menghancurkan pemukiman kelompok pengajian di Umbul Cihideung yang menewaskan sebagian besar anggota kelompok pengajian, termasuk salah seorang pimpinannya yang bernama Warsidi. Menurut keterangan resmi pemerintah yang disampaikan Panglima Daerah Militer (Pangdam) II Sriwijaya, Mayor Jenderal R. Soenardi, hanya 27 orang yang tewas, 19 ditahan dan 250 masuk daftar pencarian orang.¹ Sejumlah aktifis pengajian di Sumatera Barat, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat ditangkap oleh jajaran Komando Daerah Militer (Kodam) masing-masing, seperti istri dan anak-anak Azwar Kaili di tangkap di Painan, Sumatera Barat;² Arifin bin Karyan ditangkap di Merak, Jawa Barat;³

Ikhwan Sidik, Sukardi, Nur Hidayat, Fauzi Isman ditangkap di Jakarta;⁴ Baharudin dan Abdul Gani Masykur di Bima dan Mataram, Nusa Tenggara Barat.⁵ Peristiwa 7 Februari 1989 dikenang dengan lima nama, yaitu; (i) Komando Mujahidin Fisabilillah, (ii) Gerakan Pengacau Keamanan Warsidi, (iii) Peristiwa Cihideung, (iv) Peristiwa Talangsari, dan (v) Peristiwa Lampung. Dalam makalah ini digunakan istilah Peristiwa Lampung.

Surat kabar nasional memberitakan Peristiwa Lampung setelah pemerintah melalui Pangdam Sriwijaya Mayjen Soenardi menyampaikan keterangan resmi pada 9 Februari 1989 di Palembang,

¹ *Suara Pembaharuan* 10/2/1989.

² Wawancara dengan Azwar Kaili (L.1942) 16 Mei 2000 di Jakarta.

³ Wawancara dengan Arifin bin Karyan (L.1956) 3 Juni 2000 di Jakarta.

⁴ Wawancara terpisah di Jakarta dengan Ikhwan Sidik (1966) 19 Mei 2000, Sukardi (L.1960) 17 Maret 2000, Nur Hidayat (L.1959) 20 Juni 2000, dan Fauzi Isman (L.1967) 2 Maret 2000.

⁵ Al-Chaidar, *Lampung Bersimbah Darah*, (Jakarta: Madani Press, 2000), h.174-176.

Sumatera Selatan. Ia menuduh kelompok pengajian di Umbul Cihideung telah melakukan serangkaian kegiatan subversif untuk menumbangkan Presiden Soeharto. Pertama, memberikan khotbah bernada ekstrem, yakni menghasut masyarakat agar menentang pemerintah dan menumbuhkembangkan sikap anti terhadap Pancasila. Kedua, membuat panah-panah beracun dan mengumpulkan botol-botol kosong untuk dibuat bom molotov. Ketiga, melakukan kegiatan bela diri.⁶

Pengembangan berita surat kabar nasional tentang Peristiwa Lampung 1989 yang pada umumnya menjadikan keterangan resmi pemerintah sebagai sumber utama, membuat berita yang disajikan bersifat seragam yang cenderung membenarkan tindakan kekerasan pemerintah. Surat kabar nasional mengembangkan tuduhan pemerintah sehingga menimbulkan gambaran negatif kelompok pengajian di Umbul Cihideung, seperti tidak mau bekerja gotong royong, tidak mengibarkan dan tidak menghormati bendera merah putih dalam Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, mencaci maki pemerintah, melakukan hubungan seks bebas karena seks adalah suatu rezeki yang tidak boleh ditolak berdasarkan doktrin 'nikmatku adalah nikmatmu', tidak memakai celana dalam maupun bra (BH/kutang), dan penganut aliran sesat *lelempahan* (perjalanan). Aliran *lelempahan* mewajibkan penganutnya untuk sholat di atas tanah tanpa alas, melarang mencari kekayaan dan melarang sholat bersama-sama dengan

⁶ Lihat misalnya *Suara Karya* 10/2/1989, *Kompas* 10/2/1989, *Suara Pembaharuan* 10/2/1989, *Merdeka* 10/2/1989, *Angkatan Bersenjata* 10/2/1989.

penganut agama Islam di luar kelompoknya.⁷ Gambaran negatif kelompok pengajian di Umbul Cihideung dipertegas dalam laporan rahasia Badan Intelijen ABRI yang mencatat pokok-pokok ajaran Warsidi, antara lain; (i) pemerintah Indonesia tidak sah karena tidak menggunakan hukum yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis, (ii) Pancasila dan UUD 1945 tidak perlu ditaati karena buatan manusia, (iii) tidak mau menghormati bendera merah putih, (iv) menentang program Keluarga Berencana karena pada hakekatnya KB adalah pembunuhan bibit manusia, (v) melarang pengikutnya menjadi pegawai negeri karena gaji pegawai negeri berasal dari hasil judi, (vi) menolak membayar pajak karena membayar pajak sama artinya dengan orang miskin membantu orang kaya.⁸

Situasi politik tahun 1989 tidak memungkinkan bagi surat kabar nasional untuk memberikan informasi yang berbeda dari keterangan resmi. Dengan kata lain, surat kabar nasional telah menjadi corong Pemerintah Orde Baru. Meski mengandung kelemahan, tapi informasi surat kabar nasional sangat bermanfaat dalam mempermudah penelitian karena surat kabar nasional ternyata tidak hanya menceritakan kronologi Peristiwa 7 Februari 1989, tetapi juga memaparkan data-data tentang perkembangan daerah-daerah yang diteliti seperti Umbul Cihideung, Desa Rajabasa Lama,

⁷ Lihat misalnya *Lampung Post* 22/2/1989 dan 24/2/1989, *Panji Masyarakat* No.603 21-28/2/1989, h. 23-25, *Editor* No.25/THN.II/18 Februari 1989, h. 15-16, dan *Tempo* 25 Februari 1989, h.24-25.

⁸ Dikutip dalam Markas Besar TNI & Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, *Sejarah TNI Jilid V 1984-2000.*, (Jakarta: Markas Besar TNI & Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000), h. 39-40.

Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Tengah dan Propinsi Lampung. Laporan perjalanan wartawan beberapa surat kabar nasional juga dilengkapi dengan informasi data-data tentang perkembangan penduduk beserta problematikanya.⁹

Peristiwa Lampung 1989 kembali diungkap surat kabar nasional setelah pemberlakuan kebebasan pers oleh Presiden Habibie (1998-1999) dan Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001). Komite Solidaritas Masyarakat Lampung (Smalam) di Lampung dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) di Jakarta telah mengumpulkan data yang berbeda dengan keterangan resmi terutama dalam masalah jumlah korban.

Tinjauan Historiografi

Buku pertama yang menulis tentang Peristiwa Lampung 1989 adalah karya P. Bambang Siswoyo, *Peristiwa Lampung dan Gerakan Sempalan* (Ttp.: U.D. Mayasari, April 1989). Karya Siswoyo pada dasarnya merupakan kumpulan berita dari surat kabar yang disusun tanpa memperhatikan aspek kronologi. Di samping itu, Siswoyo tidak mencantumkan surat kabar yang menjadi rujukannya. Analisa dalam karya Siswoyo sepenuhnya mengutip hasil seminar Yayasan Kajian Komunikasi Dakwah 11 Februari 1989 di Hotel Kartika Candra, hanya saja Siswoyo tidak mencantumkannya secara jujur.

Buku kedua tentang Peristiwa Lampung 1989 ialah al-Chaidar,

Lampung Bersimbah Darah: Menelusuri Kejahatan 'Negara Intelijen' Orde Baru Dalam Peristiwa Jama'ah Warsidi (Ttp.: Madani Press, 2000).

Karya al-Chaidar dari segi sumber informasi lebih baik dari karya Siswoyo yang hanya mengandalkan berita surat kabar. Sumber utama al-Chaidar diperoleh dari serangkaian wawancara dengan orang-orang yang terlibat Peristiwa Lampung 1989 minus mantan pejabat militer dan sipil. Al-Chaidar terlalu mempercayai informasi dari para informan. Di samping itu, ia telah mencampuradukan antara informasi para informan tentang aktifitas mereka pada masa lalu dengan penafsiran informan terhadap aktifitas mereka pada masa lalu. Pencampuradukan ini menyebabkan informasi yang diperoleh al-Chaidar menjadi menyimpang, karena penafsiran informan terhadap peristiwa masa lalu telah dipengaruhi perkembangan zaman serta kepentingan politik maupun ekonomi informan bersangkutan.

Penulis juga memperoleh informasi yang sudah bercampur antara pengalaman informan dengan tafsiran informan terhadap semua aktifitas yang telah mereka lakukan di masa lalu, misalnya, seorang informan dengan bersemangat mengisahkan tujuan aktifitasnya pada tahun 1989 di Umbul Cihideung merupakan persiapan untuk menyambut kejatuhan Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Informasi ini jelas sangat dipengaruhi perkembangan politik tahun 1998 sehingga informasinya sama sekali tidak dapat digunakan sebagai data sejarah.

Kelemahan lain dari karya al-Chaidar ialah ketidakjujurannya dalam mencantumkan sumber informasi untuk data-data yang eksklusif, seperti informasi keterkaitan antara Warsidi

⁹ Lihat misalnya *Suara Karya* 21/2/1989, *Pelita* 28/2/1989, 1/3/1989, dan *Kompas* 14/3/1989, 15/3/1989, 16/3/1989, 17/3/1989, dan 18/3/1989.

dengan kelompok bawah tanah Negara Islam Indonesia (NII). Penulis mendapati rujukan yang jelas dalam buku Sejarah Tentara Nasional Indonesia jilid V (1984-2000) tentang keterkaitan antara Warsidi dengan kelompok bawah tanah NII. Tujuan utama mengungkapkan keterkaitan dengan NII adalah untuk membuktikan kebenaran tuduhan pemerintah bahwa kelompok pengajian Warsidi mempunyai cita-cita ingin mendirikan Negara Islam. Dari segi metodologi sejarah, kebenaran analisa buku ini – khususnya tentang Peristiwa Lampung sebanyak lima halaman (39-43) – masih patut dipertanyakan. Buku ini hanya menggunakan satu sumber informasi dalam menguraikan Peristiwa Lampung, yaitu laporan rahasia Badan Intelijen Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (BIA), *Operasi Garuda Lampung Dalam Membina Persatuan dan Kesatuan Bangsa*. Laporan disusun oleh Direktur A BIA Brigadir Jenderal Abdul Makhmud Hendropriyono. Ia adalah mantan Komandan Resort Militer 043 Garuda Hitam Lampung pada saat terjadi Peristiwa Lampung 1989.¹⁰ Buku ini sama sekali tidak melakukan kritik sumber terhadap informasi dari laporan rahasia BIA tersebut.

Beberapa Hipotesa

Hipotesa pertama tentang Peristiwa Lampung 1989 diajukan oleh Pangdam II Sriwijaya Mayjen R. Soenardi pada 9 Februari 1989 di Palembang, Sumatera Selatan, bahwa Peristiwa Lampung 1989 terjadi karena pemerintah ingin menumpas gerakan subversif pimpinan Warsidi alias Anwar

yang berpusat di Umbul Cihideung, Dukuh Talangsari III, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Tengah – Lampung. Tujuan gerakan subversif Warsidi adalah mendirikan Negara Islam di Indonesia.¹¹ Para pejabat negara seperti Panglima ABRI Jenderal Try Soetrisno, Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (Kabakin) Yoga Sugomo, Menteri Pertahanan dan Keamanan L.B. Moerdani, Menteri Koordinasi Politik dan Keamanan Sudomo, mendukung hipotesa Soenardi.¹²

Hipotesa kedua dikembangkan surat kabar, yaitu Peristiwa Lampung merupakan akibat keresahan sosial. Di antara penyebab keresahan sosial di Lampung Tengah adalah kebijakan pemerintah tahun 1985 yang mengusir penduduk Kecamatan Gunung Balak dengan alasan bahwa Gunung Balak diperlukan untuk hutan lindung sesuai dengan peraturan 1937. Penduduk setempat tidak hanya kehilangan tanah tapi juga tanaman kopi dan cengkeh yang siap panen. Mereka pun memberi perlawanan hingga sempat berhadapan dengan aparat keamanan. Pemerintah menerapkan kebijakan represif untuk mengosongkan daerah sekitar Gunung Balak setelah kematian seorang polisi kehutanan dalam bentrokan dengan masyarakat.¹³

¹⁰ Markas Besar TNI & Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, *op.cit.*, h. 39-43.

¹¹ Lihat misalnya, *Suara Karya* 10/2/1989, *Kompas* 10/2/1989, *Suara Pembaharuan* 10/2/1989, *Merdeka* 10/2/1989, *Angkatan Bersenjata* 10/2/1989.

¹² Lihat misalnya, *Pelita* 14/2/1989, *Kompas* 15/2/1989, *Suara Karya* 15/2/1989, *Angkatan Bersenjata* 14/2/1989 dan 18/2/1989, *Suara Pembaharuan* 15/2/1989

¹³ Lihat misalnya, *Kompas* 16/2/1989; *Editor* No.25/THN.II/18 Februari 1989, h.17-18; dan *Tempo* 25 Februari 1989, h.25-28.

Hipotesa ketiga, diberikan oleh Martin van Bruinessen dalam acara seminar sehari pada tanggal 11 Februari 1989 di Hotel Kartika Candra – Jakarta. Tema seminar adalah Analisa Kritis Berkembangnya Gerakan Sempalan di Kalangan Umat Islam Indonesia, dan diselenggarakan oleh Yayasan Kajian Komunikasi Dakwah. Pusat perhatian hipotesa ketiga sangat berbeda dengan hipotesa pertama dan kedua, sebab hipotesa ketiga lebih memperhatikan fenomena kelompok pengajian Warsidi dalam kalangan umat Islam Indonesia.

Istilah sempalan merupakan padanan kata dari sekte atau sektarian yang mempunyai konotasi negatif seperti protes terhadap pemisahan dari mayoritas, sikap eksklusif, pendirian tegas tetapi kaku, klaim akan monopoli kebenaran dan pada saat bersamaan menganggap kelompok lain salah.

Di Indonesia ada kecenderungan untuk melihat gerakan sempalan terutama sebagai ancaman terhadap stabilitas dan keamanan, dan untuk segera melarangnya, sehingga sulit untuk membedakan antara gerakan sempalan dan gerakan terlarang atau gerakan oposisi politik. Hampir semua aliran, paham dan gerakan yang pernah dicap 'sempalan' ternyata memang telah dilarang – atau sekurang-kurangnya diharamkan – oleh Majelis Ulama. Beberapa contoh yang terkenal adalah: Islam Jama'ah, Ahmadiyah Qodan, DI/TII, Mujahidin-nya Warsidi (Lampung), Syi'ah, Baha'i, Inkarus Sunnah, Darul Arqom (Malaysia), Jama'ah Imran, gerakan usroh, aliran-aliran tasawuf berpaham wahdatul wujud, Tarekat Mufariridiyah dan gerakan Bantaqiyah (Aceh).¹⁴

Hipotesa keempat diberikan Sartono Kartodirdjo dalam dua tulisan singkatnya di Harian Umum *Kompas* 21 Februari 1989, "Pandangan Sejarah tentang Peristiwa Lampung" dan Majalah Mingguan *Editor* No.26 THN.II 25 Februari 1989, "Peristiwa Lampung dalam Perspektif Sejarah". Kartodirdjo dalam dua tulisannya menyimpulkan bahwa kelompok pengajian Umbul Cihideung adalah sebuah gerakan Ratu Adil. Ratu Adil adalah kepercayaan masyarakat Jawa tentang kemunculan sang juru selamat.¹⁵

Peristiwa 7 Februari 1989

Peristiwa 7 Februari 1989 berawal dari kerjasama antara kelompok pengajian Nur Hidayat di Jakarta dengan Warsidi di Lampung. Kesepakatan kerja sama tercapai pada 12 Desember 1988 di Cibinong, Jawa Barat. Pertemuan Cibinong juga diikuti aktifis pengajian di luar kelompok Nur Hidayat dan Warsidi. Gagasan membangun *islamic village* (kampung Islam) dari kelompok pengajian Nur

¹⁴ Martin van Bruinessen, *Gerakan Sempalan di Kalangan Umat Islam Indonesia: Latar Belakang Sosial-Budaya*, dalam *Jurnal Ulumul Qur'an* Vol. III No. 1 Th. 1992, h. 16. Penebalan kalimat dari Penulis.

¹⁵ Pemikiran Sartono Kartodirdjo tentang perkembangan kepercayaan Ratu Adil yang mewujudkan diri menjadi sebuah gerakan perlawanan terhadap penguasa dapat dilihat dalam Sartono Kartodirdjo, *Tjatatant Tentang Segi-Segi Messianistis Dalam Sedjarah Indonesia*, (Djogjakarta: Penerbitan Lsutrurn ke-II Universitas Gadjah Mada 19 Desember 1959); *The Peasant' Revolt of Banten in 1888: Its Conditions, Course and Sequel, A Case Study of Social Movements in Indonesia*, (The Hague, Martinus Nijhoff, 1966; *Protes Movements in Rural Java*, (London: Oxford University Press, 1973, *Ratu Adil*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984); dan "Respon-Respon Pada Penjajahan Belanda di Jawa: Mitos dan Kenyataan", *Prisma* No.11, 1984, Tahun XIII, h.3-11.

Hidayat digabungkan dengan cita-cita mendirikan pondok pesantren yang sedang dilaksanakan kelompok pengajian Warsidi. Umbul Cihideung – pusat kegiatan kelompok pengajian Warsidi – ditetapkan sebagai lokasi pembangunan *islamic vilage* dan pondok pesantren. Warsidi dalam rangka membangun pondok pesantren telah bekerja sama dengan kelompok pengajian Abdullah di Desa Sidorejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Tengah. Abdullah adalah mantan aktifis gerakan *usroh* Abdullah Sungkar Solo yang melarikan diri ke Lampung pada tahun 1986.

Umbul Cihideung pada awalnya merupakan bagian wilayah Desa Labuhan Ratu. Namun, sejak 1 Januari 1988 menjadi bagian Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Tengah. Umbul Cihideung disatukan dengan Umbul Kebon Duren menjadi Dusun Talangsari III. Lokasi Umbul Cihideung cukup terpencil, yakni di ujung barat Desa Rajabasa Lama, dan berbatasan langsung dengan Desa Labuhan Ratu dan Desa Pakuan Aji. Setiap orang harus melewati tiga jembatan kecil terbuat dari batang pohon kelapa untuk memasuki wilayah Umbul Cihideung yang dikelilingi dua sungai, sehingga Umbul Cihideung mirip sebuah pulau.¹⁶

Pekerjaan masyarakat Umbul Cihideung adalah petani. Warsidi dan seluruh anggota kelompok pengajiannya bekerja sebagai buruh tani harian. Mereka menggarap tanah orang lain atau memberi jasa bantuan pada saat panen dan awal penanaman.¹⁷

¹⁶ Lihat misalnya *Suara Karya* 21/2/1989 dan *Pelita* 28/2/1989, 1/3/1989.

¹⁷ Wawancara terpisah dengan Fadilah (L.1958) dan Seman Sodikin (L.1963).

Sedangkan profesi anggota kelompok pengajian Nur Hidayat bukan petani. Profesi anggota kelompok pengajian Nur Hidayat sangat beragam, misalnya aktifis LSM (Sudarsono), pedagang (Sukardi dan Ikhwan Sidik), montir motor (Arifin bin Karyan), calon pegawai negeri (Fauzi Isman), satpam (Wahidin dan Margotugino), dan mantan pegawai negeri (Nur Hidayat).

Anggota kelompok pengajian Nur Hidayat pindah ke Umbul Cihideung secara perorangan sejak akhir Desember 1988. Masyarakat setempat menerima dengan baik. Ketegangan justeru terjadi antara pendatang dengan pejabat sipil, seperti Kepala Dusun Talangsari III Sukidi, Kepala Desa Rajabasa Lama Amir Puspamega dan Camat Way Jepara Drs. Zulkifli Maliki. Ketiganya mempermasalahkan keberadaan orang-orang baru di Umbul Cihideung atas undangan Warsidi. Ketegangan terus meningkat setelah Warsidi menolak permintaan Camat Way Jepara melalui surat tertanggal 20 Januari 1989 untuk menghadap ke kantor. Sebaliknya, Warsidi mengundang Camat Way Jepara untuk menyaksikan secara langsung kegiatan mereka di Umbul Cihideung. Undangan Warsidi dipenuhi Camat Way Jepara pada 21 Januari 1989. Sejak itu ketegangan dengan pejabat lokal terus meningkat, seiring dengan kebijakan aparat keamanan dari Babinsa Desa Rajabasa Lama dan Koramil Way Jepara untuk memperketat pengawasan. Tersiar kabar bahwa Warsidi akan ditangkap Danramil Way Jepara Kapten Soetiman, sehingga Warsidi menolak undangan menghadap ke kantor Koramil Way Jepara. Warsidi mencurigai undangan Soetiman sebagai tipu muslihat untuk menangkap dirinya.¹⁸

Penolakan Warsidi dilaporkan Soetiman kepada atasannya, Kepala Staf Daerah Militer (Kasdim) Kabupaten Lampung Tengah Mayor Oloan Sinaga. Laporan Soetiman seharusnya ditangani oleh Komandan Daerah Militer (Dandim) Kabupaten Lampung Tengah Letkol Jufri A.H.Adam. Namun yang bersangkutan baru saja diangkat sebagai Bupati Lampung Utara. Mayor Oloan Sinaga bertindak selaku Dandim Kabupaten Lampung Tengah sebelum diangkat pejabat tetap.¹⁹

Pada 1 Pebruari 1989 Mayor Oloan Sinaga memimpin rapat koordinasi Musyawarah Pimpinan Kabupaten (Muspika) Lampung Tengah. Rapat memutuskan untuk menangkap Warsidi karena tidak bersedia menghadap Camat Zulkifli Maliki dan Danramil Kapten Soetiman untuk menjelaskan kegiatan di Umbul Cihideung. Hasil keputusan rapat dilaporkan kepada Komandan Resort Militer (Danrem) 043 Garuda Hitam Lampung Kolonel Hendropriyono.²⁰ Berita penangkapan Warsidi bocor (atau dibocorkan?) hingga tersebar luas. Warsidi segera memerintahkan seluruh laki-laki dewasa di Umbul Cihideung untuk membuat panah sebagai antisipasi serangan dari Koramil Way Jepara, dan memperketat jaga malam di sekitar pemukiman.²¹ Keterangan ini sangat berbeda dengan keterangan pemerintah bahwa anak panah dibuat di luar Umbul Cihideung. Warsidi juga mengutus Sofwan – seorang anggota

kelompok pengajian Nur Hidayat – pergi ke Jakarta untuk memberitahu Nur Hidayat, Sudarsono dan Fauzi Isman tentang perkembangan ketegangan di Umbul Cihideung.

Meski situasi tegang, namun Warsidi tetap melaksanakan rencana pengajian di Umbul Cihideung pada 5 Februari 1989. Seluruh anggota kelompok pengajian Abdullah yang berusia antara 8-14 tahun turut meramaikan pengajian di Umbul Cihideung. Anggota kelompok pengajian Abdullah berasal dari Desa Sidorejo dan Desa Bandar Agung. Mereka menginap di Umbul Cihideung se usai acara pengajian. Lima anak didik Abdullah, yakni Muhdi, Mursyidin, Mundiman, Abdurrahman dan Hardiwan pergi ke pos jaga depan menemani Joko Jayus dan Ir.Usman yang sedang mendapat giliran jaga. Sekitar pukul 24.00 WIB mereka disergap aparat keamanan yang dipimpin Sersan Mayor Dahlan dari Koramil Way Jepara dan Koprak Rahman (Babinsa Rajabasa Lama).²² Joko Jayus dilepas, sedang Ir.Usman berhasil melarikan diri di perjalanan menuju Kantor Koramil Way Jepara.²³

Jayus dan Usman melaporkan tentang penculikan 5 anak-anak kelompok pengajian Abdullah oleh aparat keamanan kepada Warsidi. Ia sangat marah dan langsung mengangkat Abdullah sebagai panglima perang. Abdullah segera menunjuk Fadilah menjadi Komandan Tim Pembebas dengan misi utama membebaskan 5 anak yang diculik. Tim Pembebas berjumlah 12 orang. Upaya pembebasan

¹⁸ Wawancara terpisah dengan Sukardi (L.1960), 17 Maret 2000 di Jakarta, Arifin bin Karyan (L.1956) 3 Juni 2000 di Jakarta.

¹⁹ Editor, No.25/THN.II/25 Februari 1989, h.11.

²⁰ Mabes TNI & Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, *op.cit.*, h. 41.

²¹ Wawancara dengan Sukardi.

²² Wawancara dengan Muhdi (L.1970) pada tanggal 23 Mei 2000 di Jakarta. Lihat juga *Tempo* 18/2/1989, h.15, dan Mabes TNI & Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, *op.cit.*, h. 41.

²³ Wawancara dengan Muhdi (L.1970).

gagal, karena 5 anak kelompok pengajian Abdullah sudah dibawa pergi ke Kodim Lampung Tengah. Tim Pembebas kemudian menuju ke Sidorejo untuk menemui Zamzuri – tokoh masyarakat Sidorejo yang bersimpatik terhadap Warsidi.²⁴

Pada saat Warsidi dan seluruh anggota kelompok pengajian menanti kabar Tim Pembebas itulah rombongan Muspika Lampung Tengah dibawah pimpinan Kasdim Lampung Tengah Mayor Oloan Sinaga datang ke Umbul Cihideung. Kapten Soetiman dengan mengendarai sepeda motor berada di barisan paling depan. Warsidi beserta seluruh anggota kelompok pengajian langsung menyerang Soetiman hingga tewas. Rombongan Muspika segera ke luar dari Umbul Cihideung dengan meninggalkan mayat Soetiman. Keesokan harinya pasukan yang lebih besar dibawah komando Danrem 043 Garuda Hitam menghancurkan lokasi pemukiman kelompok pengajian Warsidi di Umbul Cihideung untuk mengambil mayat Soetiman.

Latar Belakang Politik

Fenomena kemunculan kelompok pengajian Nur Hidayat dan Warsidi serta keputusan pemerintah untuk menghancurkan pemukiman mereka di Umbul Cihideung pada 7 Februari 1989 tidak bisa dilepaskan dari latar belakang politik yang penuh kecurigaan antara Pemerintah Orde Baru dengan kalangan Islam. Pengertian kalangan Islam dalam makalah ini adalah individu atau kelompok yang menggunakan ajaran Islam sebagai ideologi. Dengan demikian, tidak semua pemeluk agama Islam

dimasukan ke dalam kalangan Islam, seperti mereka yang tergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Golongan Karya (Golkar), dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Individu atau kelompok pemeluk agama Islam yang menggunakan ajaran Islam sebagai ideologi cenderung menyalurkan aspirasi politiknya ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pemilu 1977 dan 1982 mencerminkan kecenderungan bahwa kalangan Islam memberikan dukungan penuh terhadap PPP untuk menentang kebijakan pemerintah, misalnya penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan pemberlakuan Undang-Undang Politik tentang keharusan menggunakan asas tunggal Pancasila. Dua kebijakan pemerintah ini menjadi sumber utama yang merusak hubungan antara kalangan Islam dengan Pemerintah Orde Baru.

Gagasan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari disampaikan Presiden soeharto secara berturut-turut pada acara Kongres Nasional Pramuka 12 April 1976, Peringatan Hari Pramuka ke-XV 14 Agustus 1976²⁵ dan Pidato Kenegaraan 16 Agustus 1976.

.....Pancasila bukan saja cukup jika kita miliki, tetapi harus kita resapi sedalam-dalamnya, harus kita hayati sehingga menjadi bagian jiwa dan tingkah laku kita, harus kita amalkan dalam kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat kita.

Marilah kita terus memasyarakatkan Pancasila dan mempancailakan masyarakat kita! Untuk itu perlu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang jelas dan mudah

²⁴ Wawancara terpisah dengan Fadilah (L.1958) dan Seman Sodikin (L.1963) pada 27 Nopember 2000 di Jakarta.

²⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Himpunan Pidato Presiden Republik Indonesia Triwulan ke-III tahun 1976*, h. 241-244.

dipahami oleh masyarakat luas, oleh kita semua.

.....Gagasan tersebut saya namakan "Eka Prasetya Panca Karsa".

"Eka Prasetya" berarti janji atau tekad kita yang satu bahwa sebagai manusia mahluk sosial, kita harus berani dan mampu untuk mengendalikan kepentingan pribadi guna memenuhi kewajibannya sebagai mahluk sosial – sebagai warga negara – dalam mewujudkan kehidupan Pancasila. Dan yang kita janjikan atau tekad kita itu adalah untuk melaksanakan "Panca Karsa" – lima keinginan, lima kemauan yang keras – ialah pengetrapan kesadaran sebagai mahluk sosial itu terhadap lima sila dari Pancasila yang saya sebutkan tadi.

Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila itu harus kita renungkan bersama sedalam-dalamnya dan harus kita pikirkan semasak-masaknya. Karena itu saya telah meminta kepada kalangan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian agar mengkaji masalah itu dari sudut ilmu pengetahuan. Saya tugaskan kepada Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional untuk menghimpun gagasan-gagasan atau saran-saran tersebut. Maksudnya adalah agar kita menemukan pedoman bersama yang jujur dan benar, yang tidak terpengaruh hanya oleh selera pribadi atau golongan. Hasil pengkajian itu saya usulkan nanti agar menjadi bahan pertimbangan bagi MPR untuk memutuskan dan mengukuhkan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila itu.²⁶

Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) melakukan aksi *walk out* dari ruang sidang komisi B dalam Sidang Umum MPR 18 Maret 1978 yang mengesahkan keinginan Presiden Soeharto untuk 'meresapi, menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat' menjadi Tap No.II MPR/1978 tentang P4. Aksi *walk-out* FPP mengundang kemarahan Presiden Soeharto. Dalam pidato tanpa teks pada acara Rapat Pimpinan ABRI (Rapim ABRI) di Pakan Baru, Riau, 27 Maret 1980, Soeharto menuduh FPP dan kalangan Islam pada umumnya sebagai pihak yang tidak setia terhadap ideologi Pancasila.

Salah satu konsensus yang memang kita perjuangkan agar supaya semua partai politik atau Golongan Karya itu mendasarkan satu ideologi, ialah Pancasila, nyatanya belum terwujud. Sehingga masih ada dari kekuatan partai politik untuk menambahkan di sampingnya asas Pancasila, asas lainnya. Ini tentunya sangat menunjukkan tanda tanya kepada kita apa sebabnya mereka belum lagi mempercayai sepenuhnya Pancasila sebagai satu ideologi.

*.....dari perkembangan pembentukan Undang-Undang Kepartaian dan Golongan Karya sampai kepada pelaksanaan Sidang Umum MPR (1978) masih membuktikan pula akan keraguan daripada Pancasila, terutama proses dari Ketetapan MPR Nomer II mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, sampai kepada *walk out*.*

....Ini semuanya harus – paling tidak sedikit-dikitnya – menunjukkan atau meminta kepada kita akan kewaspadaan

²⁶ Ibid, h. 279-281.

*kita semuanya dalam rangka mengamankan Pancasila.*²⁷

Dalam pidato tanpa teks itu, Presiden Soeharto meminta ABRI agar meningkatkan kewaspadaan dan ekstra hati-hati dalam memilih partner untuk mengelola negara. Partner itu harus dipastikan terdiri dari individu yang tidak pernah ragu-ragu terhadap Pancasila. Kalimat *'masih ada dari kekuatan partai politik untuk menambahkan di sampingnya asas Pancasila, asas lainnya'* ditujukan terhadap kalangan Islam yang pada tanggal 18 Maret 1978 melakukan aksi *walk out* yang oleh Presiden Soeharto dijadikan bukti ketidaksetiaan terhadap Pancasila.

Tudingan ketidaksetiaan kalangan Islam terhadap Pancasila bukan yang pertama kali dilontarkan Presiden Soeharto, misalnya pada acara penutupan Rapim ABRI 25 Maret 1976²⁸, pembukaan Musyawarah Nasional Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata (Munas Ppapri) 19 April 1976,²⁹ serta Munas Ppapri dan Persatuan Istri Purnawirawan 30 Juni 1977 di Jakarta. Presiden Soeharto memberikan analisa menyeramkan bahwa apabila PPP memenangkan Pemilu 1977 maka dasar negara Pancasila akan diganti dengan Islam. Untuk itu, Presiden Soeharto meminta kepada seluruh keluarga purnawirawan

ABRI dan anggota ABRI aktif agar bersiap-siap mempertahankan Pancasila, kalau perlu dengan cara kekerasan.

*Mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara inilah yang menjadi tugas yang teramat penting dari para purnawirawan ABRI! Mempertahankan Pancasila adalah tugas yang mutlak.....Tugas mempertahankan, menghayati dan mengamalkan Pancasila ini adalah tugas kita semua, tugas seluruh masyarakat, tanpa kecuali. Tugas itu lebih-lebih merupakan tugas mutlak bagi setiap anggota ABRI dan para purnawirawan.....Prajurit ABRI dan setiap purnawirawan adalah warga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Ini berarti bahwa kita tidak akan membiarkan Pancasila diselewengkan*³⁰

Pemerintah Orde Baru melancarkan kebijakan represif dalam 'rangka mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara'. Sejumlah aktifis dan tokoh Islam ditangkap menjelang Pemilu 1977, seperti Ketua Umum Gerakan Pemuda Indonesia (GPI) Abdul Qadir Djaelani, tokoh kelompok mesjid Salman Bandung Ir. Imaduddin Abdurrahim, Msc, Wakil Sekjen PPP 1973-1984 Mahbub Juanidi, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Prof. Dr. Ismail Sunny, dan tokoh perang 10 Nopember 1945 Sutomo. Selain itu banyak ulama yang dilarang berkhotbah dan bahkan dipenjara dengan tuduhan menyebarkan rasa

²⁷Pidato tanpa teks Presiden Soeharto ini ditulis ulang secara lengkap dalam *Merdeka* 4 Agustus 1980, "Pidato Tanpa Teks pada Rapim ABRI Pakanbaru".

²⁸Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Himpunan Pidato Presiden Republik Indonesia Triwulan ke-I tahun 1976*, h. 56-58.

²⁹Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Himpunan Pidato Presiden Republik Indonesia Triwulan ke-II tahun 1976*, h. 83-85.

³⁰Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Himpunan Pidato Presiden Republik Indonesia Triwulan ke-II tahun 1977*, h. 201-203.

kebencian terhadap Pemerintah Orde Baru.³¹ Pada 20 April 1981 di Jakarta Panglima Kopkamtib Laksamana Soedomo mengungkapkan serangkaian aksi teror Komando Jihad yang ingin merombak Negara Pancasila.³² Dalam kurun waktu 1976-1989, pemerintah selalu mengaitkan aktifitas kalangan Islam dengan gerakan Darul Islam (DI) yang telah mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) pada tahun 1949.³³

³¹ Faisal Ismail. 1999 (terj.), *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama* (Yogyakarta: Tiara Wacana), h. 155.

³² Lihat misalnya, *Suara Karya* 21/4/1981, *Pelita* 21/4/1981, dan *Kompas* 21/4/1981.

³³ Gerakan DI dibangun Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo pada tahun 1948 dalam Konferensi Umat Islam Jawa Barat di Pangawedusan, Desa Cisayong, Garut, Jawa Barat. Kartosoewirjo memproklamkan NII pada 7 Agustus 1949. Pengaruh DI/NII sempat meluas ke Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Pemerintah Indonesia menghancurkan Gerakan DI/NII pada tahun 1962. Lihat, Cornelis van Dijk (terj.), *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, (Jakarta: Grafitipress, 1983); Karl D. Jackson, *Traditional authority, Islam, and Rebellion* (Berkeley: University of California Press, 1980); Holk H. Dengel (terj.), *Darul Islam Dan Kartosuwirjo*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995); Barbara Sillars Harvey (terj.), *Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi ke DI/TII*, (Jakarta: Grafitipres, 1989); Anhar Gonggong, *Abdul Qohhar Mudzakkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak*, (Jakarta: Grassindo, 1992); Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh*, (Jakarta: Grafitipress, 1990). Antara tahun 1962-1970 seluruh tahanan eks. DI Jawa Barat ditangani Kodam Siliwangi. Namun, sejak tahun 1970 penanganan tahanan eks. DI Jawa Barat diambilalih Deputy III Bakin Letjen Ali Moertopo. Lihat Heru Cahyono, *Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1998), dan Heru Cahyono, *Peranan Ulama Dalam Golkar 1971-1980* (Jakarta: Sinar Harapan, 1992).

Pertumbuhan Kelompok Sempalan

Kalangan Islam terdiri dari berbagai individu dan kelompok Islam. Ada tiga kelompok Islam yang menjadi *mainstream* (arus utama/kelompok inti), yakni Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketiganya mempunyai ortodoksi dalam masalah agama Islam.³⁴ Secara berturut-turut antara tahun 1984-1986, NU, MUI dan Muhammadiyah menerima kebijakan asas tunggal Pancasila yang dahulu sangat ditentangnya. Keharusan mengenakan Pancasila bagi seluruh organisasi masyarakat diatur dalam UU Politik No.8 tahun 1985, sedangkan ketentuan asas tunggal Pancasila untuk partai politik dan Golkar diatur dalam UU Politik No.3 tahun 1985. PPP juga menerima UU Politik No.3 tahun 1985. Penerimaan asas tunggal Pancasila oleh NU, MUI, Muhammadiyah dan PPP telah mengubah pula sikap politik kalangan Islam dari konfrontatif menjadi akomodatif. Perubahan sikap politik ini terjadi setelah pemerintah menjamin bahwa pemberlakuan asas tunggal Pancasila tidak dimaksudkan untuk menggantikan posisi agama Islam sebagai acuan moral dalam kehidupan sehari-hari.³⁵

Kalangan Islam di luar kelompok *mainstream* membentuk beberapa kelompok pengajian kecil untuk melanjutkan sikap politik konfrontatif dengan menjadikan asas tunggal Pancasila sebagai isu utama. Di antara kelompok pengajian kecil itu adalah Risalah Tauhid pimpinan Abdullah

³⁴ Martin van Bruinessen, *op.cit.*, h. 17.

³⁵ Lihat Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999).

Sungkar yang berpusat di Pondok Pesantren al-Mukmin Desa Ngruki, Solo, Jawa Tengah. Sekitar tahun 1983 mereka berhasil memperluas wilayah pengaruhnya hingga ke ibukota Jakarta yang berpusat di Condet, Jakarta Timur dan Mesjid Santa, Jakarta Selatan. Dua pusat ini menjadi Ring Condet dan Ring Santa. Kelompok pengajian Risalah Tauhid lazim pula disebut gerakan *usroh* karena Abdullah Sungkar menggunakan pola *usroh* dari gerakan Ikhwanul Muslimin.³⁶ Gerakan *usroh* Abdullah Sungkar dihancurkan pemerintah pada tahun 1985 bersamaan dengan penerapan UU No. 3 dan 8 tahun 1985.

Para aktifis gerakan *usroh* Abdullah Sungkar dari Solo, Jawa Tengah, melarikan diri ke Lampung dan membentuk kelompok pengajian di bawah pimpinan Warsidi, seorang guru agama di Lampung.³⁷ Sementara aktifis gerakan *usroh* Abdullah Sungkar Jakarta tetap berada di Jakarta. Mereka dihimpun kembali pada tahun 1987 oleh Nur Hidayat, mantan tokoh gerakan *usroh* Abdullah Sungkar Ring Santa yang menjadi buronan dalam kasus *usroh* Jakarta sejak tahun 1986. Ia bekerja sama dengan Abdul Haris, Sudarsono dan Arifin Agule. Abdullah Haris pernah aktif dalam gerakan *usroh* Abdullah Sungkar Ring Santa, sedangkan Sudarsono dan Arifin Agule

adalah aktifis Badan Kontak Pemuda Mesjid Indonesia (BKPMI) dan Lembaga Studi Pembangunan (LSP) pimpinan Adi Sasono (sekarang Ketua Umum ICMI). Nur Hidayat, Abdul Haris, Sudarsono, dan Arifin Agule membentuk kelompok pengajian dengan pola kepemimpinan bersama dengan membagi pimpinan menjadi empat berdasarkan nama empat sahabat Nabi Muhammad s.a.w, yakni Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. Empat bagian kepemimpinan ini disebut *shaf*.

Pembagian pimpinan *shaf* didasarkan pada keahlian masing-masing. Nur Hidayat adalah mantan karateka nasional, sehingga ia dipercaya untuk memimpin *shaf* Ali dengan tugas utama mengadakan pelatihan fisik kepada para anggota. Abdul Haris memimpin *shaf* Abu Bakar dengan tugas utama memberikan pemahaman agama kepada para anggota, Arifin Agule memimpin *shaf* Umar dengan tugas utama mengadakan konsolidasi, Sudarsono memimpin *shaf* Usman dengan tugas utama mencari dana. Di samping mengadakan pengajian rutin, mereka juga belajar agama dari Sulaeman Mahmud, mantan aktifis gerakan Darul Islam Aceh yang sejak tahun 1984 berstatus tahanan luar Kodam V Jaya berkaitan dengan kasus Tanjung Priok. Kerjasama Nur Hidayat, Abdul Haris, Sudarsono dan Arifin Agule tidak berlangsung lama. Abdul Haris dan Arifin Agule mengundurkan diri pertengahan tahun 1988.³⁸ sejak itu Nur

³⁶ Ikhwanul Muslimin didirikan pada tahun 1928 di Ismailiyah, Mesir, oleh Hasan Ahmad Abdul Rahman al-Banna (1905-1949). Lihat misalnya, Richard Mitchell, *The Society of The Muslim Brothers* (London: Oxford University Press, 1969) dan Ustman Abdul Mu'iz Ruslan (terj.), *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, (Solo: Intermedia, 2000).

³⁷ Wawancara terpisah dengan mantan anggota gerakan *usroh* Abdullah Sungkar Solo, seperti Fadilah (L.1958) dan Seman Sodikin (L.1963) pada 27 Nopember 2000 di Jakarta.

³⁸ Wawancara terpisah dengan Nur Hidayat (L.1959) pada 20 Juni 2000 di Jakarta, Wahidin (L.1949) 2 Maret 2000 di Jakarta, Sudharsono (L.1963) 3 Juni 2000 di Jakarta, Arifin Agule (L.1961) 10 Juni 2000 di Jakarta, Abdul Haris (L.1965) 6 Juni 2000 di Jakarta, dan Fausi Isman (L.1967) 2 Maret 2000 di Jakarta.

Hidayat menjadi pimpinan utama, sehingga kelompok pengajian ini dapat dikatakan sebagai kelompok pengajian Nur Hidayat.

Antara kelompok pengajian Nur Hidayat di Jakarta dengan kelompok pengajian Warsidi di Lampung mempunyai kesamaan pandangan bahwa penerimaan asas tunggal Pancasila sangat bertentangan dengan kewajiban setiap muslim untuk senantiasa menerapkan syari'ah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tetap memandang kebijakan asas tunggal Pancasila sebagai upaya Pemerintah Orde Baru untuk menjadikan Pancasila sebagai acuan menilai kualitas moral dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian mereka mempunyai sikap politik yang sangat berbeda dengan kelompok *mainstream* Islam (NU, MUI, Muhammadiyah).

Penyempalan kelompok pengajian Nur Hidayat dan Warsidi juga terjadi dalam orientasi pemahaman keagamaan, terutama dengan NU. Doktrin NU berpangkal pada tiga buah panutan inti; pertama, mengikuti paham al-Asy'ari dan al-Maturidi dalam bidang *tauhid* (teologi); kedua, mengikuti salah satu dari empat mazhab *fiqh* (hukum Islam) yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali); dan ketiga, mengikuti cara yang ditetapkan al-Junaid al-Baghdadi dalam bertarekat dan bertasawuf.³⁹ Kelompok pengajian Nur Hidayat dan Warsidi tidak mengikuti pemikiran al-Asy'ari, al-Maturidi, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan al-Junaid al-Baghdadi. Dari segi pemahaman hukum Islam, mereka lebih merujuk pendapat

mazhab Ja'fari yang tidak pernah dijadikan bahan referensi umat Islam di Indonesia. Sebagai contoh adalah pandangan mereka terhadap kedudukan orang tua mempelai perempuan dalam acara perkawinan. Umat Islam di Indonesia, baik yang berafiliasi ke NU maupun Muhammadiyah, sangat mementingkan kedudukan orang tua mempelai perempuan – terutama orang tua laki-laki – karena perkawinan tidak akan sah apabila orang tua laki-laki dari mempelai perempuan tidak memberikan izin. Kelompok Nur Hidayat dan Warsidi meninggalkan aturan ini dengan menghilangkan keharusan memperoleh izin orang tua laki-laki dari mempelai perempuan.

Karakteristik lain dari kelompok pengajian Nur Hidayat dan Warsidi adalah mereka memandang rendah tradisi ritual NU seperti *yasinan* setiap malam Jum'at dan *kendurian* atau *selamatan* karena mereka menilai bahwa semuanya bukan berasal dari al-Qur'an dan sunnah Rasul. Dari segi cara memahami agama Islam, mereka mempunyai kesamaan dengan Muhammadiyah, yakni langsung merujuk pada teks al-Qur'an. Cara pemahaman agama yang demikian sangat berbeda dengan NU yang lebih suka merujuk pendapat ulama terlebih dahulu. Meski ada persamaan dalam cara memahami agama Islam antara kelompok pengajian Nur Hidayat dan Warsidi dengan Muhammadiyah, namun mereka tidak mempunyai hubungan organisasi.

Perbedaan sikap politik dan orientasi paham keagamaan antara kelompok pengajian Nur Hidayat dan Warsidi dengan *mainstream* Islam membuat mereka menjadi kelompok sempalan. MUI Lampung memasukkan

³⁹ Abdurrahman Wahid, "Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Dewasa ini", Prisma 4 April 1984 Tahun XII, h. 33.

mereka sebagai penganut aliran sesat *lelampahan* yang telah dilarang. Dapat dipahami apabila kelompok *mainstream* Islam tidak melakukan pembelaan atas nasib buruk yang menimpa kelompok pengajian Nur Hidayat dan Warsidi.

Tujuan utama penelitian sejarah adalah menemukan *causal power*. *Causal power* bersifat tidak kasat mata. Hal ini berbeda dengan hukum kausalitas yang cenderung untuk menghubungkan dua peristiwa dalam hubungan seba-akibat yang menentukan.⁴⁰ Hukum kausalitas dalam kasus Lampung dikemukakan surat kabar. Para wartawan bersangkutan mengaitkan antara pengusiran warga sekitar gunung Balak dengan peristiwa Lampung dalam hubungan sebab-akibat yang menentukan, sehingga menimbulkan kesan bahwa peristiwa Lampung disebabkan kemarahan penduduk gunung Balak yang terusir. Asumsi demikian tidak didukung bukti, mayoritas anggota kelompok pengajian Warsidi dan Nur Hidayat bukan warga gunung balak yang terusir.

Causal power kasus Lampung diajukan Sartono Kartodirdjo dengan mengangkat segi-segi messianistik tentang kepercayaan terhadap Ratu Adil. Ratu Adil adalah tokoh sang juru selamat yang berasal dari ramalan Jayabaya. Dalam perkembangannya, kepercayaan Ratu Adil milik etnis Jawa bercampur dengan kepercayaan Imam Mahdi yang ada dalam agama Islam.⁴¹ Ratu Adil atau Imam Mahdi merupakan tokoh sang juru selamat yang akan menciptakan kesejahteraan. Sang tokoh juru selamat sangat dihormati

berdasarkan karisma yang berdasarkan kemampuan supranatural seperti menyembuhkan orang sakit, memberikan kekebalan atau meramal nasib.⁴² Tokoh juru selamat dalam Peristiwa Lampung menurut Kartodirdjo adalah Warsidi.⁴³ Para informan yang terlibat Peristiwa Lampung tidak memperlihatkan rasa hormat yang mendalam ketika menceritakan sosok Warsidi, misalnya menyebut langsung nama Warsidi tanpa diawali kata penghormatan. Latar belakang keluarga Warsidi juga tidak memungkinkan dirinya memiliki karisma yang bersumber dari faktor keturunan. Ia berasal dari keluarga petani yang tidak berpengaruh. Dari segi ekonomi, Warsidi bukan seorang transmigran sukses. Sejak tahun 1966 sudah tidak memiliki tanah dan bekerja sebagai petani penggarap. Di samping itu, Warsidi tidak memiliki kekuatan supranatural yang dapat dijadikan sumber karisma dirinya.

Kekeliruan Kartodirdjo dalam memahami Peristiwa Lampung disebabkan keterbatasan informasi dan terlalu mempercayai informasi pemerintah yang telah menetapkan Warsidi sebagai pimpinan utama dengan gelar Imam untuk memberi kesan bahwa Warsidi merupakan tokoh juru selamat Imam Mahdi (Islam) atau Ratu Adil (Jawa). Berdasarkan hasil wawancara penulis ternyata Warsidi tidak pernah diangkat sebagai Imam. Ia hanyalah seorang pimpinan kelompok pengajian yang kedudukannya sejajar

⁴⁰ C. Behan McCullagh, *The Truth of History*, (London & New York: Routledge, 1998), h. 177-188.

⁴¹ Lihat Sartono Kartodirdjo, 1959, *op.cit.*

⁴² Lihat Sartono Kartodirdjo, 1984, *op.cit.*

⁴³ Sartono Kartodirdjo, "Pandangan Sejarah tentang Peristiwa Lampung," *Kompas* 21/2/1989; dan "Peristiwa Lampung dalam Perspektif Sejarah," *Editor* No.26 THN.II 25/2/1989.

dengan Nur Hidayat. Anak didiknya biasa memanggil Warsidi dengan sebutan Pak War, bukan Pak Imam atau Pak Imam Warsidi. Ketiadaan unsur messianistik membuat kelompok pengajian Warsidi dan Nur Hidayat tidak bisa dimasukkan sebagai gerakan Ratu Adil. Kita harus melihat dinamika hubungan politik antara kalangan Islam dengan Pemerintah Orde Baru dalam dekade 1970-an dan 1980-an untuk menemukan *causal power* peristiwa Lampung, sebab peristiwa Lampung adalah peristiwa lokal yang sangat berkaitan dengan dinamika politik di tingkat nasional. Hubungan politik antara kalangan Islam dengan pemerintah sangat buruk akibat kebijakan represif pemerintah terhadap kalangan Islam untuk menerima asas tunggal Pancasila. Pertengahan tahun 1980-an kelompok *mainstream* dalam kalangan Islam mengubah sikap politik dari konfrontatif menjadi akomodatif setelah pemerintah menjamin bahwa Pancasila tidak akan disejajarkan dengan agama. Peristiwa Lampung terjadi dalam proses perbaikan hubungan tersebut. Dalam kaitan ini, sangat menarik untuk memperhatikan tanggapan Presiden Soeharto yang hanya mengatakan bahwa peristiwa Lampung terjadi akibat pemaksaan kehendak. Penilaian Soeharto lebih lunak dari Panglima ABRI Jenderal Try Sutrisno, Kabakin Yoga Sugama, Menhankam L.B. Moerdani, Menko Polkam Sudomo dan Pangdam Sriwijaya Mayjen R. Soenardi yang telah menetapkan kelompok pengajian Nur Hidayat dan Warsidi sebagai gerakan subversif. Hipotesa ini sangat berlebihan dan tidak didukung bukti. Kelompok Warsidi dan Nur Hidayat tidak memiliki kemampuan finansial maupun sumber daya manusia untuk

melancarkan gerakan subversif menumbangkan Presiden Soeharto. Kehadiran mereka di Umbul Cihideung adalah untuk membangun pondok pesantren agar dapat menerapkan syari'ah Islam dalam kehidupan sehari-hari, bukan untuk mendirikan Negara Islam sebagaimana dituduhkan pejabat militer.

Daftar Pustaka

Dokumen

Sekretariat Negara Republik

Indonesia, *Himpunan Pidato Presiden Republik Indonesia* Triwulan ke-III tahun 1976.

_____ *Himpunan*

Pidato Presiden Republik Indonesia Triwulan ke-I tahun 1976, h. 56-58.

_____ *Himpunan*

Pidato Presiden Republik Indonesia Triwulan ke-II tahun 1976, h. 83-85.

_____ *Himpunan*

Pidato Presiden Republik Indonesia Triwulan ke-II tahun 1977, h. 201-203.

Wawancara

Abdul Haris (L.1965)

Arifin Agule (L.1961)

Arifin bin Karyan (L.1956)

Azwar Kaili (L.1942)

Fadilah (L.1958)

Fauzi Isman (L.1967) .

Ikhwan Sidik (1966)

Muhdi (L.1970).

Nur Hidayat (L.1959)

Seman Sodikin (L.1963).

Sudharsono (L.1963)

Sukardi (L.1960)

Wahidin (L.1949)

Buku

- Al-Chaidar, 2000, *Lampung Bersimbah Darah*, Jakarta: Madani Press.
- Cahyono, Heru. 1998, *Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974*, Jakarta: Sinar Harapan.
- _____, 1992, *Peranan Ulama Dalam Golkar 1971-1980* (Jakarta: Sinar Harapan, 1992).
- Dengel, Holk H. 1995, *Darul Islam Dan Kartosuwirjo*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Dijk, Cornelis van, 1983, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, Jakarta: Grafitipress.
- Gonggong, Anhar, 1992, *Abdul Qohhar Mudzakkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak*, Jakarta: Grassindo.
- Harvey, Barbara Sillars, 1989, *Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi ke DI/TII*, Jakarta: Grafitipres
- Ismail, Faisal 1999, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Jackson, Karl D., 1980, *Traditional authority, Islam, and Rebellion*, Berkeley: University of California Press
- Kartodirdjo, Sartono, 1966, *The Peasant' Revolt of Banten in 1888: Its Conditions, Course and Sequel, A Case Study of Social Movements in Indonesia*, The Hague, Martinus Nijhoff
- _____, 1973, *Protes Movements in Rural Java*, London: Oxford University Press.
- _____, 1984, *Ratu Adil*, Jakarta: Sinar Harapan.

- Markas Besar TNI & Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000, *Sejarah TNI Jilid V 1984-2000.*, Jakarta: Markas Besar TNI & Pusat Sejarah dan Tradisi TNI
- McCullagh, C. Behan, 1998, *The Truth of History*, London & New York: Routledge.
- Mitchell, Richard, 1969, *The Society of The Muslim Brothers*, London: Oxford University Press.
- Ruslan, Ustman Abdul Mu'iz, 2000. *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, Solo:Intermedia.
- Sjamsuddin, Nazaruddin. 1990, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh*, Jakarta: Grafitipress.

Artikel

- Bruniessan, Martin van, *Gerakan Sempalan di Kalangan Umat Islam Indonesia: Latar Belakang Sosial-Budaya*, dalam Jurnal Ulumul Qur'an Vol. III No. 1 Th. 1992.
- Kartodirdjo, Sartono, *Tjataan Tentang Segi-Segi Messianistis Dalam Sedjarah Indonesia*, (Djogjakarta: Penerbitan Lsutrum ke-II Universitas Gadjah Mada 19 Desember 1959);
- _____, "Respon-Respon Pada Penjajahan Belanda di Jawa: Mitos dan Kenyataan", *Prisma No.11, 1984, Tahun XIII, h.3-11.*
- _____, "Pandangan Sejarah tentang Peristiwa Lampung," *Kompas 21/2/1989*
- _____, "Peristiwa Lampung dalam Perspektif Sejarah," *Editor No.26 THN.II 25/2/1989.*

Wahid, Abdurrahman, "Nahdlatul
Ulama dan Islam di Indonesia
Dewasa ini", Prisma 4 April 1984
Tahun XII, h. 33.

Surat Kabar

Angkatan Bersenjata 10/2/1989.

_____ 14/2/1989

_____ 18/2/1989,

Suara Karya 10/2/1989

_____ 15/2/1989,

_____ 21/2/1989

_____ 21/4/1981

Suara Pembaharuan 10/2/1989

_____ 15/2/1989.

Kompas 21/4/1981.

_____ 10/2/1989

_____ 15/2/1989,

_____ 16/2/1989;

_____ 14/3/1989,

_____ 15/3/1989,

_____ 16/3/1989,

_____ 17/3/1989,

_____ 18/3/1989.

Lampung Post 22/2/1989

_____ 24/2/1989

Merdeka 4/8/1980

_____ 10/2/1989

Pelita 21/4/1981,

_____ 14/2/1989,

_____ 28/2/1989

_____ 1/3/1989

Majalah

Editor No.25/THN.II/18 Februari

1989

_____ No.25/THN.II/25 Februari

1989

Panji Masyarakat No.603 21-28/2/

1989

Tempo 18/2/1989

_____ 25 Februari 1989